

**TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH DUSTŪRĪYAH* TERHADAP
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 39/PUU-
XVII/2019 TENTANG HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN
DAN WAKIL PRESIDEN YANG BERPOTENSI TERJADINYA
PENGULANGAN PEMILIHAN**

SKRIPSI

Oleh

**Nobel Pramudya
NIM. C05216043**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Prodi Hukum Tata Negara
Surabaya
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nobel Pramudya

NIM : C05216043

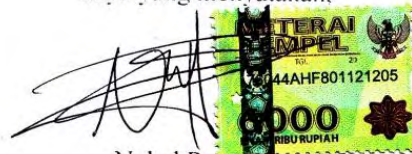
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum
Tata Negara

Judul Skripsi : TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH DUSTŪRIYAH*
TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 39/PUU-XVII/2019
TENTANG HASIL PEMILIHAN UMUM
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN YANG
BERPOTENSI TERJADINYA PENGULANGAN
PEMILIHAN

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah penelitian/karya sendiri,
kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 20 Desember 2020

Saya yang menyatakan,

A green 6000 Rupiah postage stamp from Indonesia is placed over the signature. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'TERAI EMPAL', '10. 27', '44AHF801121205', '6000', and 'RUPIAH'.

Nobel Pramudya
NIM. C05216043

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Nobel Pramudya NIM. C05216043 ini telah diperiksa dan dipersetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 21 Desember 2020

Pembimbing,



Prof. Dr. H. Titik Triwulan Tutik, S.H.,M.H
NIP. 19803292000032001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Nobel Pramudya C05216043 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Jum'at 15 Januari 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum.

Majelis Munaqosah Skripsi :

Penguji I,



Prof. Dr. H. Titik Triwulan Tutik, S.H., MH
NIP. 196803292000032001

Penguji II



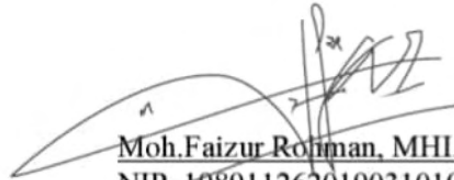
Drs. H. Jeje Abd. Rojaq, M. Ag
NIP. 196310151991031003.

Penguji III



Dr. Hj. Nurul Anisa Nadhifah, M. Hi
NIP. 197504231003122001

Penguji IV



Moh. Faizur Rohman, MHI
NIP. 198911262019031010

Surabaya, 15 Januari 2021

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan



Dr. H. Masruhan, M. Ag.
NIP. 195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nobel Pramudya
NIM : C05216043
Fakultas/Jurusan: Syariah dan Hukum / Hukum Publik Islam
E-mail address : nobelpramudya1997@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

**TINJAUAN FIQH SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 39/PUU-XVII/2019 TENTANG HASIL
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN YANG
BERPOTENSI TERJADINYA PENGULANGAN PEMILIHAN**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 18 Juni 2021

Penulis

(Nobel Pramudya)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Tinjauan *Fiqh Siyasah Dusturiyah* Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Yang Berpotensi Terjadinya Pengulangan Pemilihan” Penelitian ini mendeskripsikan dan mengkaji mengenai beberapa permasalahan, pertama mengenai bagaimana analisis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019 tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang Berpotensi Terjadinya Pengulangan Pemilihan. Kedua, Tinjauan *Fiqh Siyasah Dusturiyah* Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang Berpotensi Terjadinya Pengulangan Pemilihan.

Penelitian hukum ini menggunakan penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk membuat deskripsi mengenai obyek penelitian secara sistematis, akurat, dan faktual mengenai syarat dari obyek penelitian yang kemudian dihubungkan dengan putusan terkait. Sumber data yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi kepustakaan atau dengan nama *Library Research*, Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Teknis analisis yang digunakan adalah metode induktif. Selanjutnya data tersebut dianalisis menggunakan teori hukum Islam, yaitu *Fiqh Siyasah Dusturiyah*.

Hasil penelitian ini menyebutkan dikabulkannya permohonan *judicial review* yang menyatakan Pasal 416 ayat (1) Undang – Undang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Penelitian yang kedua, Pemilihan Umum merupakan kegiatan yang banyak permasalahan dikala tidak sesuai dengan data yang dikumpulkan. Hal ini menjadi lebih bermasalah jika terdapat pengulangan yang timbul apabila beberapa syarat tidak terpenuhi. Pengulangan terjadi, waktu banyak terbuang untuk memilih pemimpin kembali, serta pelanggaran hak hak warga negara banyak terjadi pelanggaran yang menimbulkan permasalahan ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi.

Untuk mencapai keadilan proposional yang dicita-citakan, baiknya putusan Mahkamah Konstitusi memberikan penjelasan untuk tidak mengulang perkara yang sama. Sebab MK merupakan lembaga yang bersifat final dan tidak boleh ada permohonan yang sama untuk diajukan, serta mengingatkan kembali pembuat kebijakan bahwa perlunya transparansi data dalam hal ini adalah putusan MK diharapkan dapat diakses untuk memudahkan informasi masyarakat pencari keadilan.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
LEMBAR PUBLIKASI	v
MOTTO	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	11
C. Rumusan Masalah.....	12
D. Kajian Pustaka.....	13
E. Tujuan Penelitian.....	16
F. Kegunaan Hasil Penelitian	16
G. Definisi Operasional	17
H. Metode Penelitian.....	18
I. Sistematika Pembahasan	22
BAB II PEMILIHAN PEMIMPIN DALAM FIQH DUSTURIYAH DAN	
 HUKUM POSITIF	24
A. Konsep Fiqh Siyasah	24
1. Pengertian Fiqh Siyasah	24
2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah	26
3. Pemilihan Pemimpin dalam <i>Fiqh Dusturiyah</i>	27
B. Pemilihan Pemimpin menurut Hukum Positif	30
1. Konsep Pemilihan.....	30
2. Ruang Lingkup Pemilihan Umum.....	32
3. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.....	34

BAB III	PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN BERPOTENSI PENGULANGAN MENURUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI.....	35
	A. Deskripsi / Posisi Kasus	35
	B. Legal Standing.....	37
	C. Pertimbangan Hakim	41
	D. Konklusi.....	51
	E. Amar Putusan	51
BAB IV	TINJAUAN <i>FIQIH SIYASAH</i> TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 39/PUU-XVII/2019 TENTANG HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN YANG BERPOTENSITERJADINYA PENGULANGAN PEMILIHAN.....	54
	A. Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor39/PUU-XVII/2019	54
	B. Tinjauan <i>Fiqih Siyasah</i> Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019	58
BAB V	PENUTUP	63
	A. Kesimpulan	63
	B. Saran	64
	DAFTAR PUSTAKA.....	65

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan umum merupakan kegiatan memilih calon yang telah diusulkan untuk menjadi pemimpin dalam suatu negara untuk menyuarakan pendapat masyarakat. Masyarakat dalam keadaan aman tidak ada tekanan atau ancaman serta diperlakukan secara adil dalam memilih calon pemimpin untuk memajukan Negeranya.

Pemilihan umum dalam Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017

Pasal 1 angka (1) mempunyai pengertian bahwa Pemilihan umum merupakan bentuk dari kedaulatan rakyat yang diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Harmaily Ibrahim dan Kusnardi berpendapat bahwa, Pemilu adalah hak asasi warga negara yang sangat prinsipil, karena dalam pelaksanaan hak asasi adalah suatu kewajiban pemerintahan untuk melaksanakan Pemilu. Sesuai asas bahwa rakyatlah yang berdaulat maka semua itu dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya.

Oleh karena itu Pemilu adalah suatu syarat yang mutlak bagi negara demokrasi untuk melaksanakan kedaulatan rakyat.¹

A.S.S. Tambunan² menjabarkan bahwa Pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat yang hakikatnya untuk mewujudkan dan pengakuan daripada hak-hak politik rakyat sekaligus pendelegasian hak-hak tersebut oleh rakyat kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan.

M. Rusli Karim,³ berpendapat tentang pengertian Pemilu, yaitu Salah satu sarana utama untuk menegakkan kedaulatan rakyat, yang berfungsi sebagai alat menyehatkan dan menyempurnakan demokrasi, bukan sebagai tujuan demokrasi.

Kedaulatan berada di tangan rakyat sebagaimana tertuang dalam pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung oleh rakyat merupakan perwujudan atas kedaulatan rakyat untuk menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis. Kedua Penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan hanya dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum yang tertuang dalam pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.⁴

¹ Moh. Kurnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Ilmu Hukum, h.329

² A.S.S. Tambunan, *Pemilu di Indonesia dan Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD*, Bandung: Binacipta.3

³ M. Rusli Karim, *Pemilu Demokratis Kompetitif*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2007.

4. Penjelasan atas undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Peraturan tentang Pemilu untuk saat ini yang benar benar baru dibahas dan ditetapkan adalah Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana Undang-Undang pemilihan umum yang baru, maka digunakanlah dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di tahun 2019.

⁵ Gusmansyah Wery, *Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) dalam Perspektif Siyashah*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar(Anggota IKAPI),2017, h.1

Undang Undang Dasar 1945 dalam pasal 6A ayat (3) berbunyi ‘Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.’”

Pasal 6A ayat (3) UUD NRI 1945 yang dituangkan kembali dalam Pasal 416 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengakibatkan perdebatan yaitu untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden harus memenuhi beberapa syarat dalam Pilpres. Syarat yang dipenuhi adalah harus mendapat lima puluh persen lebih dari jumlah suara dalam

[illegible]

Permasalahan terjadi apabila syarat syarat dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tidak terpenuhi sebagaimana tertuang dalam pasal 416 ayat (1). Warga Negara Indonesia (WNI) akan merasa dirugikan jika hal tersebut terjadi pengulangan, dari segi hak asasi manusia dalam bertempat tinggal, mendapatkan keadilan dan lain lain. Mahkamah Konstitusi menerima permohonan dari para pemohon untuk Pasal 6A ayat (3) ini diterapkan bagi dua pasangan calon atau tiga pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Permohonan perbaikan diajukan pada Rabu, 11 September 2019 yang berisi bahwa pasal 416 ayat (1) dalam Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memiliki makna yang multitafsir. Pasal tersebut seakan akan syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden harus mendapatkan suara yang sesuai. Syarat suara yang tidak sesuai dengan bunyi pasal akan mengakibatkan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan pengulangan. Permohonan yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi telah mendapat nomor perkara 39/PUU-XVII/2019

1945 tertuang kembali kepada undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, tertuang sama persis sehingga pasal 6A ayat (3) tidak memiliki pembahasan yang seharusnya dijelaskan lebih lanjut dengan undang-undang.

Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; Menyatakan Pasal 416 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat selama tidak dimaknai “tidak berlaku untuk pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yang hanya diikuti 2 (dua) pasangan calon”.

1945 tertuang kembali kepada undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, tertuang sama persis sehingga pasal 6A ayat (3) tidak memiliki pembahasan yang seharusnya dijelaskan lebih lanjut dengan undang-undang.

Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; Menyatakan Pasal 416 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat selama tidak dimaknai “tidak berlaku untuk pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yang hanya diikuti 2 (dua) pasangan calon”.

1945 tertuang kembali kepada undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, tertuang sama persis sehingga pasal 6A ayat (3) tidak memiliki pembahasan yang seharusnya dijelaskan lebih lanjut dengan undang-undang.

Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; Menyatakan Pasal 416 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat selama tidak dimaknai “tidak berlaku untuk pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yang hanya diikuti 2 (dua) pasangan calon”.

Pandangan Islam dalam pemilu memang menjadi perdebatan antara halal atau haram dilakukan. Pemilihan pemimpin yang terjadi di Indonesia merupakan pemilihan pemimpin yang dilakukan dengan cara musyawarah. Musyawarah disini dimaksudkan bahwa umat dapat memilih pemimpinnya siapa yang pantas agar negara tetap berdiri dan bersatu serta masyarakat yang tercipta menjadi sejahtera. *Syara'* menetapkan metode pemilihan *khalifah*. Metode tersebut adalah *Al-Intikhab* (memilih) dalam politik Islam tentu ini

merupakan hak umat untuk memilih siapa yang sesuai dengan kriteria untuk dijadikan pemimpin.

Seorang pemimpin ada dalam suatu kelompok akan membentuk persatuan sama lain. Selain itu dengan adanya sosok pemimpin dapat mencegah dari adanya kerusakan dan mewujudkan tujuan kemaslahatan umat. Imāmah ditegakkan merupakan salah satu kewajiban dalam agama. Ada pula dalil yang memaparkan bahwa adanya seorang pemimpin dalam suatu kelompok adalah kewajiban, terdapat dalam Al-Qur'an Surat An – Nisa : 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا ۖ لِلَّهِ وَطِيعُوا ۖ لِلرَّسُولِ وَأُولِي ۖ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَّعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ۖ اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ۖ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ ۖ خَيْرٌ ۖ

وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan *ulil amri* (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian (Q.S An - Nisa: 59).

Bernegara dan bermasyarakat memiliki syarat yaitu harus peraturan yang ditaati dan seorang pemimpin. Apabila tidak adanya peraturan dan pemimpin, maka terjadilah kekacauan di kehidupan masyarakat dan kehancuran di dalam negara. Pengalaman yang pernah dialami dalam perang Uhud merupakan salah satu contoh, kalahnya umat Islam dikarenakan sebagian pasukan perang tidak taat terhadap aturan yang diberikan oleh Rasullullah.

Abu Hamid bin Muhammad bin Ahmad al - Ghazali (450 H atau 1058 M). Al - Ghazali lahir di Thus dekat Khurasan, Persia.⁸ Al - Ghazali salah satu ilmuwan dan ahli hukum terkenal tidak hanya di lingkungan Nizha Al - Mulk, tetapi juga di lingkungan pemerintahan Baghdad.⁹

Imam al - Ghazali mengemukakan bahwa hukumnya wajib atau keharusan adanya seorang pemimpin. Al – Ghazali menyatakan bahwa agama dan kekuasaan politik memiliki hubungan yang sangat erat dijabarkan dengan bahasa Sulthan adalah wajib untuk ketertiban dunia dan ketertiban dunia wajib bagi ketertiban agama sehingga ketertiban agama wajib bagi keberhasilan saat di akhirat.¹⁰

Al – Mawardi berpandangan lain mengenai hukum dalam memilih pemimpin. Al – Mawardi sebagaimana ahli dalam bidang hukum *mazhab Syafi'i* pernah menjadi hakim di berbagai penjurur kota. Ketika pemerintahan *khalifah* al - Qadir (991- 1031 M) Al- Mawardi diangkat menjadi Ketua Mahkamah Agung (Qadhiy al - Qudhat) di Baghdad. Segala kepiawaian diplomasinya Al-Mawardi dipilih sebagai penengah dalam perundingan yang

¹⁰ Al-Ghazali, *al-Iqtishad fī al-I'tiqad*, (Mesir: Maktabah al-Jund, 1972), 198-199.

Al - Mawardi menyatakan bahwa pemimpin adalah cerminan dan kunci kesejahteraan untuk masyarakat. Pemimpin disebut *imāmah* atau *khali'fah* direfleksikan dalam lembaga untuk menggantikan kenabian dengan tujuan mengatur kehidupan dunia dan melindungi agama.¹²

Pemilihan pemimpin di Indonesia dilaksanakan dengan metode pemilihan umum. Pemilu dalam Islam diperbolehkan, dikarenakan kekuasaan berada di tangan rakyat atau umat. Pemilu sama halnya dengan bermusyawarah dalam memilih pemimpin. Pada saat terpilih pemimpin maka selanjutnya pemimpin akan dibaiat menjadi *khalifah*.

Pemilu merupakan cara dalam memilih pemimpin suatu negara. Selain memilih pemimpin, dalam sistem politik Islam juga terdapat pemilihan umum untuk memilih anggota majelis yang mewakili umat. Anggota majelis yang sudah diusulkan dipilih melalui pemilihan yang dilakukan oleh umat (*Al-*

¹² Imam Al-Mawardi, *Ahkām Sultāniyyah (Sistem Pemerintahan Khilafah Islam)*, terj. Khalifurrahman dan Fathurrahman, (Jakarta: Qisthi Press, 20154), 10.

Pemilu merupakan proses memilih anggota majelis umat, maka bisa dinyatakan berbeda dengan akad khilafah. Pemilu menjadikan peran utama umat dalam mewujudkan haknya yaitu dapat memberhentikan para wakilnya dari majelis tersebut, sedangkan dalam akad *khilafah* tidak berhaknya umat dalam memberhentikan *khalifah*. Apabila *khalifah* melakukan pelanggaran *syari'at* Islam dalam kepemimpinan, maka yang berhak memberhentikan ialah mahkamah mazalim, yaitu lembaga peradilan yang berwenang menyelesaikan sengketa antara penguasa pemerintahan dan umat.

Islam mengakui prinsip musyawarah dan mengharuskan penguasa melaksanakannya, Islam melarang sikap diktator dan otoriter, Islam membebaskan umat dalam melaksanakan musyawarah, untuk memberikan keluwesan dan memperhatikan perubahan kondisi dan situasi, oleh karena itu musyawarah bisa dilakukan dengan berbagai macam cara sesuai dengan masa, bangsa, dan tradisi.

Prinsip musyawarah sering sekali dilakukan oleh Rasulullah beserta sahabatnya, misalnya dalam masalah perang Uhud. Pada saat itu Nabi dan para sahabat bermusyawarah tentang apakah akan menghadapi musuh (kafir quroish) didalam kota Madinah atau diluar kota Madinah, hasil dari musyawarah memutuskan untuk menghadapi musuh kafir quraish di luar kota Madinah.¹⁴

¹⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Nizhamu Islam...* 218

ma orang tersebut merupakan perwakilan dari k
g dari unsur Khazraj dan Aus, serta kelompok
beda dengan 'Umar ibn al-Khatthâb yang dip
eperti yang dilakukan *Khalifah* Abû Bakr. Meski
ththâb menyatakan pada saat sampai kepada
bila Umar wafat maka akan memberikan *baiat*
arang bahwa barang siapa membaiat seorang
arah, *baiatnya* dianggap tidak sah dan tidak ada
lap orang yang mengangkat *baiat* terhadapnya ata
uanya harus dibunuh.¹⁶ Riwayat ini merupak

ma orang tersebut merupakan perwakilan dari k
g dari unsur Khazraj dan Aus, serta kelompok
beda dengan 'Umar ibn al-Khatthâb yang dip
eperti yang dilakukan *Khalifah* Abû Bakr. Meski
ththâb menyatakan pada saat sampai kepada
bila Umar wafat maka akan memberikan *baiat*
arang bahwa barang siapa membaiat seorang
arah, *baiatnya* dianggap tidak sah dan tidak ada
lap orang yang mengangkat *baiat* terhadapnya ata
uanya harus dibunuh.¹⁶ Riwayat ini merupak

ma orang tersebut merupakan perwakilan dari k
g dari unsur Khazraj dan Aus, serta kelompok
beda dengan 'Umar ibn al-Khatthâb yang dip
eperti yang dilakukan *Khalifah* Abû Bakr. Meski
ththâb menyatakan pada saat sampai kepada
bila Umar wafat maka akan memberikan *baiat*
arang bahwa barang siapa membaiat seorang
arah, *baiatnya* dianggap tidak sah dan tidak ada
lap orang yang mengangkat *baiat* terhadapnya ata
uanya harus dibunuh.¹⁶ Riwayat ini merupak

ma orang tersebut merupakan perwakilan dari k
g dari unsur Khazraj dan Aus, serta kelompok
beda dengan 'Umar ibn al-Khatthâb yang dip
eperti yang dilakukan *Khalifah* Abû Bakr. Meski
ththâb menyatakan pada saat sampai kepada
bila Umar wafat maka akan memberikan *baiat*
arang bahwa barang siapa membaiat seorang
arah, *baiatnya* dianggap tidak sah dan tidak ada
lap orang yang mengangkat *baiat* terhadapnya ata
uanya harus dibunuh.¹⁶ Riwayat ini merupak

ma orang tersebut merupakan perwakilan dari k
g dari unsur Khazraj dan Aus, serta kelompok
beda dengan 'Umar ibn al-Khatthâb yang dip
eperti yang dilakukan *Khalifah* Abû Bakr. Meski
ththâb menyatakan pada saat sampai kepada
bila Umar wafat maka akan memberikan *baiat*
arang bahwa barang siapa membaiat seorang
arah, *baiatnya* dianggap tidak sah dan tidak ada
lap orang yang mengangkat *baiat* terhadapnya ata
uanya harus dibunuh.¹⁶ Riwayat ini merupak

pembahasan dalam skripsi ini, maka peneliti membuat judul kajian, Tinjauan *Fīqh Siyāsah Dustūriyah* terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-Xvii/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang Berpotensi Terjadinya Pengulangan Pemilihan.

Latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka dapat diidentifikasi masalah masalah yang akan muncul diantaranya :

- a. Terjadinya pengulangan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden kembali dikarenakan tidak terpenuhinya persyaratan yang tertuang dalam undang undang.
- b. Adanya permasalahan yang timbul ketika Mahkamah Konstitusi tidak memberi penjelasan mengenai pasal tersebut.
- c. Pemberitahuan akan putusan yang kurang menyebar sehingga Mahkamah Konstitusi bisa menerima permohonan yang sama.
- d. Perselisihan antara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden atas dasar pasal yang belum begitu jelas.

- a. Dampak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019 terhadap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
- b. Analisis *fiqh siyasah* terhadap putusan Mahkamah Konstitusi nomor 39/PUU-XVII/2019 tentang hasil pemilihan umum

Presiden dan Wakil Presiden yang berpotensi terjadinya pengulangan pemilihan.

C. Rumusan Masalah

Uraian dari latar belakang diatas dan identifikasi masalah, sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019 tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang Berpotensi Terjadinya Pengulangan Pemilihan ?
2. Bagaimana Tinjauan *Fiqih Siyasah* Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang Berpotensi Terjadinya Pengulangan Pemilihan ?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah penjelasan penelitian atau rangkuman yang sudah dilakukan disepertai persoalan yang akan diteliti sehingga pandangan bahwa kajian yang akan dilakukan supaya tidak terjadi duplikasi atau pengulangan dari penelitian atau kajian tersebut.

Kajian pustaka dilakukan guna menguraikan beberapa penelitian yang dahulu sebagaimana mempunyai objek kajian yang sama yaitu membahas perihal permasalahan mengenai permasalahan pemungutan suara Presiden dan Wakil Presiden terpilih dalam pasal 417 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Hal ini dilakukan dalam upaya menghindari plagiasi diantaranya :

- ¹⁷ Skripsi Ines Wulandari, 2017 dengan judul *Analisis Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Undang-Undang No 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden)*.

3. Jurnal Penelitian Dinamika Sosial Politik Menjelang Pemilu Serentak 2019, ditulis oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2Politik-LIPI). Jurnal ini membahas penguatan sistem presidensial dalam Pemilu serentak 2019, netralitas Polri menjelang Pemilu serentak 2019, populisme di Indonesia kontemporer, demokrasi dan Pemilu presiden 2019 dan menelaah sisi historis Shalawat Badar.¹⁹ Sedangkan di skripsi yang saya tulis adalah saya membahas tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dalam pasal 6A ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dapat dilakukan pengulangan dengan perspektif *fiqih siyasah* tanpa pembahasan serentak tidaknya Pemilu tahun 2019.

¹⁸ Artikel *Pemilu Presiden 2019: Antara Kontestasi Politik dan Persaingan Pemicu Perpecahan Bangsa* ditulis oleh Khoiril Huda, dkk

[illegible]

Beberapa tujuan yang dihasilkan atas penelitian skripsi ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa terhadap putusan Mahkamah Konstitusi nomor 39/PUU-XVII/2019 tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang Berpotensi Terjadinya Pengulangan Pemilihan..
2. Untuk meninjau secara *fiqh siyasa* terhadap putusan mahkamah konstitusi nomor 39/PUU-XVII/2019 tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang Berpotensi Terjadinya Pengulangan Pemilihan.

Kegunaan dari penelitian ini diharapkan mempunyai hasil dan manfaat yaitu :

- ²⁰ Skripsi Josua C.H. Tampubolon, 2016 dengan *judul Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-Xi/2013 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden*.

- ## G. Definisi Operasional

[illegible]

1. *Siyasah dusturiyah* ialah *siyasah* yang berkaitan dengan aturan aturan dasar tentang bentuk pemerintahan, tata cara pemilihan pemimpin, batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, serta ketetapan hak yang wajib bagi masyarakat maupun individu, serta hubungan antara penguasa dan rakyat.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi adalah putusan dari Hakim Mahkamah Konstitusi yang bertugas untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat.
3. Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden adalah hal yang digunakan untuk menentukan siapakah Presiden dan Wakil Presiden terpilih yang akan menjabat dalam periode yang ditentukan.

Penelitian tentang, Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019 tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang Berpotensi Terjadinya Pengulangan Pemilihan merupakan penelitian hukum yang bersifat normatif. Penelitian hukum normatif (*normative law research*) adalah penelitian yang menuangkan secara lengkap jelas, terperinci, dan sistematis tentang aspek aspek yang diteliti dalam putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan.²¹

[illegible]

Penelitian pustaka (*Library research*), yaitu penelitian yang menjelaskan sumber-sumber informasinya dari literatur dan buku-buku hukum yang terkait atau sesuai dengan objek yang diteliti. Penelitian ini berjudul Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang Berpotensi Terjadinya Pengulangan Pemilihan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan sebagaimana terkait penelitian ini. Peneliti akan mendapatkan informasi dan berbagai aspek mengenai isu, perkara, maupun masalah yang sedang dicari jawabannya. Pendekatan yang digunakan yaitu:

- [illegible]

b. Pendekatan Histori (*historical approach*), pendekatan histori dilakukan dalam kerangka sejarah lembaga hukum dari masa ke masa. Pendekatan ini membantu peneliti dalam memahami asal muasal atau filosofi dari aturan hukum. Peneliti juga dapat memahami perkembangan dan perubahan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut.

Peneliti menggunakan sumber data berupa sumber data primer dan sekunder serta tersier sebagaimana berikut ini:

- 1) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
- 3) Undang – Undang Nomor 42 Tahun 2008
- 4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2018
- 5) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019.

²² I MadePasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), h.142

²³ Mukti Fajar, dkk. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).h.34

- c. Bahan hukum tersier ialah bahan hukum yang memberikan pemaparan lebih terhadap bahan hukum primer dan juga bahan hukum sekunder, meliputi:

- #### 4. Teknik Pengumpulan Data.

[illegible]

5. Teknik Penyajian Data.

Teknik penyajian data dalam skripsi ini menggunakan teknik deskriptif. Teknik deskriptif adalah mencari kebenaran dengan interpretasi yang sesuai dengan tujuan memberikan penjelasan, lukisan atau gambaran secara sistematis akurat, faktual, mengenai sifat-sifat, fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diteliti.²⁴

6. Teknik Analisis Data.

Teknik analisis data dianalisis secara kualitatif sesuai persoalan tentang hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yang berpotensi terjadinya pengulangan pemilihan dengan berdasarkan teori yang ada. Berdasarkan analisis, disusunlah kesimpulan dan saran atau rekomendasi yang dijadikan rujukan dalam memperbaiki permasalahan yang diteliti, kemudian dikorelasikan dengan *fiqh siyasah dusturiyah*.

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini dimaksud guna mempermudah pemahaman dan sistematis, maka menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab Pertama : berisi tentang pendahuluan yang merupakan pemaparan umum dari keseluruhan dalam pembahasan skripsi yang mengarah pada inti pembahasan, meliputi : latar belakang masalah,

²⁴ Mohammad Nadzir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007, h.14

Bab Ketiga : Bab yang memuat hasil penelitian Putusan Mahkamah Kosntitusi, Desposisi Kasus, Legal Standing, dan Amar Putusan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang Berpotensi Terjadinya Pengulangan Pemilihan.

Bab Keempat : Bab ini memuat pembahasan yang akan mengemukakan tentang rumusan masalah tentang mekanisme terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019 tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang Berpotensi Terjadinya Pengulangan Pemilihan. Kedua, Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang Berpotensi Terjadinya Pengulangan Pemilihan.

Bab Kelima : Bab ini merupakan bab terakhir dalam penyusunan skripsi berisi tentang kesimpulan merupakan rumusan singkat

A. Pemilihan Pemimpin Menurut Dusturiyah

Secara etismologis, *fiqh* adalah keterangan tentang pemahaman atau pengertian yang mendalam terhadap maksud-maksud perbuatan dan perkataan.²⁵ *Fiqh* secara leksikal bermakna paham, tahu, dan mengerti merupakan arti yang digunakan secara khusus dalam *syari'at* Islam dan pendapat terdahulu dalam Islam.

²⁵ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah*. (Yogyakarta: Ombak, 2014), 23-24.

²⁶ Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Islam*. (Padang: Angkasa Raya, 1990), 15.

[illegible]

mengatur, dan memerintah atau pemerintahan, dan membuat kebijaksanaan.²⁸

Pengertian secara kebahasaan dimaksudkan bahwa tujuan dari *siyāsah* adalah mengurus, mengatur, dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis guna mencapai tujuan. *Fiqh siyāsah* di dalamnya terpapar secara terperinci tentang hukum kenegaraan secara Islam bertujuan guna memberi arahan dalam mengatur negara secara Islam.

Dusturi kata ini berasal dari Persia, awalnya arti seseorang yang memiliki suatu otoritas dalam bidang agama maupun politik. Kata ini ditunjukkan untuk para pendeta (pemuka agama) Zoroaster (majusi).²⁹ Setelah mengalami penyerapan bahasa Arab, kata *dusturi* berkembang menjadi dasar, asas, atau pembinaan. Secara istilah, *dusturi* bermakna kumpulan kaidah yang mengatur akan dasar dan hubungan kerja sama antar sesama masyarakat dalam negara, baik yang tidak tertulis maupun yang tertulis.

Ahkam Al – Dusturiyyah (Hukum Tata Negara dan perundang-undangan) yaitu aturan yang berkaitan dengan persoalan politik, seperti sistem dan perundang undangan dalam negara, pengaturan dasar negara, syarat-syarat, hak, dan kewajiban pemimpin, serta hubungan pemimpin dengan rakyatnya.³⁰

²⁸ Ibnu Manzur, *Lisan Al-Arab* (Beirut : Al-Shadr, 1968), h.108.

²⁹ Bernard Lewis et al, *The Encyclopedia of Islam*, vol 2, Leiden : E.J. Brill, 1978, h.638.

³⁰ Suparman Usman, *Hukum Islam*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2001. h.25.

Sumber *fiqh dusturiyah* tentu yang utama ialah Al'Qur'an Al-Karim sebagaimana ayat-ayatnya yang berkaitan dengan prinsip kehidupan dalam bermasyarakat, dalil-dalil yang Khulliy dan ajaran Al-Qur'an setelah itu Hadist terutama sekali hadist-hadist yang berkaitan dengan imamah dan kebijakan kebijakan Rasulullah dalam menerapkan hukum di negeri Arab.

Fiqh siyāsah merupakan bagian ilmu *fiqh*, sehingga ruang lingkupnya adalah individu, masyarakat dan juga negara yang meliputi bidang-bidang kekayaan, acara pembuktian, muamalah, kenegaraan,

[illegible]

perikatan, ibadah, warisan, peradilan, kriminal, , dan hukum internasional, seperti traktat, hak asasi manusia, damai, dan perang.³²

Dari uraian diatas mengenai ruang lingkup *fiqh siyasah*, maka obyek pembahasan *fiqh siyāsah* meliputi :

- Siyāṣah dusturiyah* atau *fiqh* modern disebut Hukum Tata Negara
- Siyāṣah maliyah* yaitu hukum yang mengatur tentang pengelolaan, pemasukan, dan juga pengeluaran uang milik Negara.
- Siyāṣah dauliyah* atau disebut hukum internasional Islam

3. Pemilihan Pemimpin dalam *Fiqh Dusturiyah*

- a. Syarat Pemimpin dalam Hukum Islam.

Pemegang jabatan tertinggi dalam mengurus semua urusan umat Islam, sebagai orang yang dipilih menjadi pemimpin harus memenuhi syarat dan kriteria tertentu agar dapat menjalankan tugasnya tanpa halangan. Syarat – syarat untuk menjadi seorang imam adalah

- ## 1) Islam

Al-Qur'an, As-Sunnah, dan ijma', berdasarkan ketiga hal tersebut seorang imam harus memeluk agama Islam. Imamah adalah jalan utama untuk menguasai umat Islam dan tidak diserahkan kepada orang non-muslim (kafir).

- ## 2) Berakal Sehat

³² Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam*, Surabaya, UIN Sunan Ampel Press, 2014. h.6.

3) Baligh

4) Merdeka

5) Laki-laki

6) Suku Quraisy

As-Sunnah dan Ijma' sahabat memaparkan dengan tegas bahwa pemimpin harus berasal dari Quraisy³³

Al-Mawardi memberi syarat dan ketentuan terhadap orang yang berhak dipilih sebagai kepala negara dengan tujuh syarat yaitu:

³³ Abu Ammar, *Jamaah Imamah Bai'ah, Sebuah Kewajiban Syar'i*.... h.209-221

- Hadis Nabi sebagaimana berikut ini adalah bukti bahwa Islam serius dalam memandang kepemimpinan. Nabi Shalallahu ‘Alaihi Wassallam bersabda :

إِذَا كَانَ ثَلَاثَةَ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤْمَرُوا أَحَدَهُم

Hadis ini secara terang menggambarkan betapa penting persoalan memilih pemimpin dalam Islam. Hadis ini memperlihatkan bahwa dalam sebuah kelompok Muslim yang sangat kecilpun,

[illegible]

Nabi memberi perintah bagi umat Muslim untuk memilih dan mengangkat salah satu orang di antara mereka sebagai pemimpin.

Pemilihan pemimpin di Indonesia juga menerapkan hal seperti ini dengan metode pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapat suara terbanyak dari lima puluh persen akan dilantik menjadi pemimpin negara Indonesia.

Para ulama memiliki pendapat terhadap pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tidak begitu mengena, namun mengutamakan untuk memilih pemimpin yang baik bagi negara. Pemimpin yang baik untuk negara memiliki artian yaitu terdapat sifat-sifat yang dibutuhkan sebagai sosok pemimpin tidak tamak terhadap kekuasaan, visi misi sesuai *syari'at*, memiliki pandangan dalam kondisi negara saat ini, berwibawa dan kharismatik, mengerti hukum ketatanegaraan, wajib menyukai musyawarah, konsekwen dengan akhlak, wajib dari golongan laki-laki, harus seorang muslim.³⁵

Pemimpin dipilih guna menyejahterakan rakyat.

B. Pemilihan Pemimpin Menurut Hukum Positif.

1. Konsep Pemilihan

Pemilihan umum adalah suatu kegiatan dimana para masyarakat memilih orang-orang yang diusulkan untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu.³⁶ Jabatan-jabatan politik beraneka ragam mulai dari

³⁵ Artikel yang dirangkum dari Raghieb Al-Sirjani, *Kaifa Takhtaru Al-Ra'is Al Jumhunyah*.

³⁶ Rumidan Rabi'ah, *Lebih Dekat Dengan Pemilu Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 2009), 68.

Ali Moertopo mengemukakan pada hakekatnya, Pemilu adalah sarana bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan asas yang termaktub dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Pemilu pada dasarnya adalah suatu lembaga demokrasi yang memilih anggota-anggota wakil rakyat dalam DPD, DPR, DPRD, yang pada gilirannya bertugas bersama-sama dengan pemerintah, menetapkan politik dan jalannya pemerintahan.³⁷

Presiden dan Wakil Presiden yang mendapat suara lebih dari lima puluh persen tentu terlihat bahwa mereka telah dipilih oleh umat untuk memimpin negara yang didiami. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana pada pasal 416 ayat (1) memiliki makna yang bertentangan.

[illegible]

Jalan keluar dari masalah ini dengan cara musyawarah untuk memberi penjelasan terhadap pasal tersebut. Musyawarah merupakan suatu prinsip yang diajarkan dalam Al-Qur'an sebagai etika politik, yang dijadikan media untuk mencapai mufakat apabila terjadi perbedaan pendapat. Melalui musyawarah, kekuasaan absolut dan totaliter dapat diminimalisir. Musyawarah secara metodologi diartikan sebagai forum dimana setiap permasalahan yang menyangkut kepentingan rakyat atau umum dicari solusinya dan dipertimbangkan berdasarkan alasan yang masuk akal. Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden bilamana terdapat suatu kesalahan yang menimbulkan akibat luas bagi masyarakat tentu musyawarah adalah jalan yang tepat untuk menanggulangnya.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 alenia keempat, tertulis bahwa “kemerdekaan kebangsaan Indonesia disusun dalam Undang-Undang Dasar yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat.

Kedaulatan berarti kekuasaan tertinggi atas pemerintahan negara, daerah, dan sebagainya.

Harold J Laski menyatakan bahwa kedaulatan adalah kekuasaan yang sah dan tertinggi, kekuasaan tersebut meliputi segenap orang maupun golongan dalam masyarakat yang dikuasainya.³⁸ Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 1 ayat (2) telah tertuang dimana kedaulatan berada di tangan rakyat menjadikan pemilihan umum diadakan dalam waktu-waktu tertentu. Karena Pemilu hakekatnya merupakan perwujudan dan pengakuan daripada hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak hak tersebut oleh rakyat kepada wakil-wakilnya guna menjalankan pemerintahan.³⁹

Pemilu merupakan satu kriteria untuk mengukur demokrasi sistem politik.⁴⁰ Penyelenggaraan Pemilu harus dilaksanakan secara berkualitas agar lebih menjamin derajat kompetisi yang partisipatif, sehat, mempunyai derajat keterwakilan yang lebih tinggi dan memiliki mekanisme pertanggung jawaban yang jelas. Kadar Pemilu berkualitas dapat dilihat dari asas Pemilu yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.⁴¹ Asas tersebut menjadikan negara demokrasi yang baik sehingga tercipta pula pemimpin yang baik.

³⁸ Harold J. Laski , *Demokrasi dan Sistem Pemerintahan Negara*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), 12.

³⁹ Titik Triwulan Tutik, *Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dalam Sistem Pemilu menurut UUD 1945*, (Jakarta: 2006), 35.

⁴⁰ Dahl (1985), Carter dan Herz (1982), Ranney (1990) dan Sundhaussen (1992) adalah beberapa di antara sarjana yang menganggap Pemilu sebagai kriteria untuk mengukur kadar demokrasi. Eep Saifullah Fatah, Loc.Cit.

⁴¹ Titik Triwulan Tutik, *Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang...* 38.

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia pelaksanaannya sekali dalam lima tahun. Hal ini sesuai dengan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden selama lima tahun sekali dalam satu periode. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada saat Pemilu dilaksanakan akan terdapat pasangan calon yang diusulkan dari partai politik, gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Hal ini sesuai dengan pasal 6A ayat (2) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

syarat yang belum terpenuhi sebagaimana ketentuan di pasal 6A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pengulangan disini dimaksudkan bagian ke dua yaitu dari tiga pasangan calon menjadi dua pasangan calon yang mendapat suara tertinggi. Ada syarat yang tidak terpenuhi seperti setengah dari jumlah provinsi Indonesia mendapat suara dengan sedikitnya dua puluh persen. Permasalahan yang terjadi sering kali muncul karena Pa

ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang sama persis dengan Pasal 6A ayat (3) Undang Undang Dasar Tahun 1945 bisa dinyatakan multitafsir memiliki makna yang luas antara dua pasangan atau berlaku bagi tiga pasangan Presiden dan Wakil Presiden atau lebih. Mahkamah Konstitusi sebagai pemilik kewenangan dalam pasal 24C ayat (1) untuk menindak sengketa hasil Pemilu tersebut.

**PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN YANG
BERPOTENSI TERJADINYA PENGULANGAN MENURUT PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI.**

Pemilihan umum yang dilaksanakan pada bulan April tahun 2019 sebenarnya seperti pemilihan umum biasanya namun pelaksanaannya serentak bersamaan dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Paslon Presiden dan Wakil Presiden terdapat dua saja mengakibatkan banyak perselisihan dalam pemilihan umum. Pasal 416 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi :

“Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.”

Pasal 416 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ini mengakibatkan timbul perdebatan dikarenakan untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden harus memenuhi beberapa syarat. Syarat yang dipenuhi adalah harus mendapat lima puluh persen lebih dari jumlah suara dalam pemilihan umum dan mendapat suara dengan sedikitnya dua puluh persen suara yang tersebar dari setengah provinsi di Indonesia.

Permasalahan yang terjadi adalah hanya terdapat dua pasangan calon, yang mengakibatkan Pasal 416 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak dapat terpenuhi sehingga dilakukan pengulangan. Warga Negara Indonesia akan merasa dirugikan jika hal tersebut terjadi pengulangan, dari segi hak asasi manusia dalam bertempat tinggal, mendapatkan keadilan dan lain lain. Sehingga Mahkamah Konstitusi mengabulkan bahwa dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden hanya dapat dilakukan apabila terdapat lebih dari dua paslon Presiden dan Wakil Presiden apabila tidak memenuhi persyaratan yang berlaku.

Pengulangan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden mengakibatkan berbagai kerugian apabila terdapat dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Para pemohon yaitu Ignatus Supriyadi, S.H., LL.M, Antonius Cahyadi, S.H.,LL.M, dan Gregorius Yonathan Deowikaputra, S.H sebagai Warga Negara Indonesia yang dirasa haknya dirugikan, sehingga mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi untuk memohonkan hal tersebut.

Permohonan perbaikan pada Rabu, 11 September 2019 berisi bahwa Pasal 416 ayat (1) dalam Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bermakna banyak arti (multitafsir). Pasal tersebut seakan akan syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden harus mendapatkan suara yang sesuai. Syarat suara yang tidak sesuai dengan bunyi pasal akan mengakibatkan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan pengulangan. Permohonan yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi telah mendapat nomor perkara 39/PUU-XVII/2019.

Menimbang bahwa berdasarkan dengan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan dalam hal pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang merasa bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh suatu undang-undang yang berlaku, yaitu:

B. Legal Standing

Menimbang bahwa berdasarkan dengan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan dalam hal pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang merasa bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh suatu undang-undang yang berlaku, yaitu:

1. Perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
2. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
3. Badan hukum publik atau privat; atau
4. Lembaga negara;

Dengan demikian, Para pemohon dalam hal pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus memaparkan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai para Pemohon sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

Menimbang bahwa Mahkamah Konstitusi semenjak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 pada 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 pada 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. Adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

- Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan ke

nwa norma undang-undang yang dimo

- Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon

... bahwa para Pemohon mendalilkan sebagai peror

- igilish uinsby as id digilish uinsby as id digilish uinsby as id

- Dengan demikian kerugian konstitusional para Pemohon memiliki hubungan sebab akibat (*causal verband*) dengan ketentuan yang dimohonkan pengujian;

mempertimbangkan pokok permohonan.

Pertimbangan Hakim

Bahwa bunyi Pasal 416 ayat (1) Undang-Undang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan bunyi ketentuan Pasal 6A ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi:

“Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapat suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden”.

mempertimbangkan pokok permohonan.

Pertimbangan Hakim

Bahwa bunyi Pasal 416 ayat (1) Undang-Undang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan bunyi ketentuan Pasal 6A ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi:

“Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapat suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden”.

mempertimbangkan pokok permohonan.

Pertimbangan Hakim

Bahwa bunyi Pasal 416 ayat (1) Undang-Undang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan bunyi ketentuan Pasal 6A ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi:

“Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapat suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden”.

mempertimbangkan pokok permohonan.

Pertimbangan Hakim

Bahwa bunyi Pasal 416 ayat (1) Undang-Undang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan bunyi ketentuan Pasal 6A ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi:

“Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapat suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden”.

mempertimbangkan pokok permohonan.

Pertimbangan Hakim

Bahwa bunyi Pasal 416 ayat (1) Undang-Undang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan bunyi ketentuan Pasal 6A ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi:

“Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapat suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden”.

mempertimbangkan pokok permohonan.

Pertimbangan Hakim

Bahwa bunyi Pasal 416 ayat (1) Undang-Undang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan bunyi ketentuan Pasal 6A ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi:

“Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapat suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden”.

paslon Presiden dan Wakil Presiden maka Putusan MK 50/2014 tersebut berlaku. Namun demikian, kemudian timbul masalah karena UU Pilpres tersebut ternyata telah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku oleh Pasal 571 UU Pemilu, yang dapat dikutip sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316); “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:
4. Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), serta ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”

Bahwa dalam kondisi yang sedemikian itu, maka amar Putusan MK 50/2014 tidak dapat serta merta diterapkan terhadap ketentuan Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu karena Putusan MK 50/2014 dijatuhkan terhadap bunyi ketentuan Pasal 159 ayat (1) UU Pilpres. Namun demikian, perlu dicatat bahwa dalam suatu putusan yang telah dijatuhkan oleh Mahkamah Konstitusi, yang mengikat tidak hanya amar/bunyi putusannya melainkan juga pertimbangan hukum yang menjadi dasar bagi amar putusan itu. Pasal 48 ayat (2) UU MK dan Pasal 33 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (“PMK 06/2005”) mengatur bahwa setiap putusan Mahkamah Konstitusi harus memuat antara lain pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan dan amar putusan. Kendati demikian, tidak semua pertimbangan hukum itu mengikat. Menurut Prof. Dr. Yuliandri, S.H., M.H.,

tersebut sejalan dengan pemikiran Prof. Dr. Jimly Asshikurno, yang memberikan pendapat bahwa “Pertimbangan yang masuk kategori '*ratio decidendi*' atau rasio yang berkaitan dengan kesimpulan dan amar, sedangkan '*obiter dictatum*' tidak mengikat secara hukum” (Lampiran 1). Menurut Jawabnya tersebut, Prof. Dr. Jimly Asshikurno menyatakan bahwa “Peraturan di bawah UU, bisa diuji ke Mahkamah Konstitusi menggunakan batu uji Undang-Undang dan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai pertimbangan hukum yang telah diberikan dalam putusan. Putusan tetap mengikat dan dapat dipergunakan kembali sebagai pedoman dalam mengukur dan menentukan bahwa apakah 1) UU Pemilu –yang merupakan *copy paste* dari

tersebut sejalan dengan pemikiran Prof. Dr. Jimly Asshikurno, yang memberikan pendapat bahwa “Pertimbangan yang masuk kategori '*ratio decidendi*' atau rasio yang berkaitan dengan kesimpulan dan amar, sedangkan '*obiter dictatum*' tidak mengikat secara hukum” (Lampiran 1). Menurut Jawabnya tersebut, Prof. Dr. Jimly Asshikurno menyatakan bahwa “Peraturan di bawah UU, bisa diuji ke Mahkamah Konstitusi menggunakan batu uji Undang-Undang dan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai pertimbangan hukum yang telah diberikan dalam putusan. Putusan tetap mengikat dan dapat dipergunakan kembali sebagai pedoman dalam mengukur dan menentukan bahwa apakah 1) UU Pemilu –yang merupakan *copy paste* dari

Wakil Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana

mengetahui mengenai tafsiran ketentuan Pasal 6A ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Peradilan Umum, dapat dikutip pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK 50/2014 sebagai berikut:

walaupun tidak ada pe

Selain itu, berdas

Mahkamah Konstitusi berasumsi kebijakan pemilihan Presiden secara langsung dalam UUD 1945 mengandung tujuan yang fundamental bertujuan melaksanakan kedaulatan rakyat sebagaimana bunyi Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 Presiden Republik Indonesia adalah Presiden yang memperoleh

[illegible]

dukungan dan legitimasi yang kuat dari rakyat. Prinsip yang paling utama adalah kedaulatan rakyat, sehingga Presiden terpilih adalah Presiden memperoleh legitimasi yang kuat dari rakyat. Tujuan untuk mencapai itu, berbagai jalan lain telah dibahas pada saat perubahan UUD 1945, antara lain, terdapat usulan bahwa dua paslon Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih oleh rakyat secara langsung dipilih oleh MPR atau diajukan oleh partai politik pemenang pertama dan kedua dalam pemilihan umum lembaga perwakilan rakyat. Keseluruhan itu dalam rangka proses demokrasi berdasarkan kedaulatan rakyat. Apabila terdapat dua paslon Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan oleh gabungan partai politik yang bersifat nasional, menurut Mahkamah Konstitusi pada saat tahap pencalonan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden telah memenuhi prinsip representasi keterwakilan seluruh daerah di Indonesia karena calon Presiden dan Wakil Presiden sudah didukung oleh gabungan partai politik nasional yang merepresentasikan penduduk di seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian, tujuan kebijakan pemilihan Presiden yang merepresentasi seluruh rakyat dan daerah di Indonesia sudah terpenuhi.”

Bahwa dengan demikian, terang dan jelas Mahkamah Konstitusi telah memberikan penafsiran bahwa ketentuan dalam Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 hanya berlaku dalam hal paslon Presiden dan Wakil Presiden yang mengikuti Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden lebih dari dua, sedangkan jika hanya diikuti dua pasangan maka langsung berlakulah ketentuan pasangan yang memperoleh suara terbanyak sebagai pemenang/pasangan terpilih tanpa harus melalui pemilihan kedua sekalipun syarat yang diwajibkan dalam Pasal

Hakim Mahkamah Konstitusi mempunyai hak dan kewenangan untuk melakukan interpretasi hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, *judicial interpretation* atau penafsiran oleh hakim diperlukan untuk menemukan hukum, dan metode penemuan hukum itu dapat dilakukan melalui penafsiran/interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis, interpretasi historis, interpretasi teleologis atau sosiologis

“Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah Pasal 159 ayat (1) UU 42/2008, harus dimaknai apabila terdapat lebih dari dua pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Artinya, jika hanya ada dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden maka

Bahwa di samping itu, muatan materi Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu juga telah menimbulkan ketidakpastian hukum mengingat jika syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal tersebut tidak dapat dipenuhi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang hanya diikuti oleh dua pasangan calon, maka akan sangat terbuka terjadinya Pemilu Presiden dan Wakil Presiden berulang-ulang terus menerus sampai adanya satu pasangan calon yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Lalu, akan sampai kapan itu harus dilakukan? Apa yang akan terjadi dengan sistem kenegaraan dan pemerintahan jika tidak ada pasangan calon yang memenuhi peroleh suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 419 ayat (1) UU Pemilu dimaksud? Dengan demikian, bunyi ketentuan Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu jelas telah menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga bertentangan dengan hak konstitusional para Pemohon akan jaminan kepastian hukum sebagaimana dimaksud dan ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

[illegible]

maka terjadi kekosongan hukum karena bunyi Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu tidak dapat mengantisipasi atau memberikan jalan keluarnya. Klausula atau jalan keluar dari keadaan seperti itu sebenarnya telah diberikan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK 50/2014, namun ironisnya dalam muatan Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu tidak mempertimbangkan atau menambahkan amar Putusan MK 50/2014. Dalam putusan tersebut, jalan keluar diberikan dengan ketentuan bahwa apabila hanya terdapat dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden maka penentuan pasangan calon terpilih didasarkan pada perolehan suara terbanyak.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka sekalipun yang dimohonkan dalam perkara ini adalah UU Pemilu yang berbeda dengan UU Pilpres tetapi karena muatan Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu sama persis atau identik dengan bunyi Pasal 159 ayat (1) UU Pilpres yang telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai hanya berlaku dalam hal terdapat dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Putusan MK 50/2014, sudah sepantasnya dan selayaknya menurut hukum permohonan dalam perkara ini haruslah diputus sama atau sesuai dengan Putusan MK 50/2014, yaitu materi muatan Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945

dan oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai tidak berlaku dalam hal hanya terdapat dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

E. Amar Putusan

Pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XII/2014 berlaku mutatis mutandis dalam putusan *a quo*;
Pokok permohonan dari para Pemohon beralasan sesuai hukum.

1. Amar Putusan

- [illegible]

c. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

nikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku R Aswanto, Enny Nurbaningsih, Wahiduddin Adar aldi Isra, Suhartoyo, Manahan M.P. Sitompul, da sising sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal , tahun dua ribu sembilan belas, dan hari Rabu, t a September, tahun dua ribu sembilan belas, yang eno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum a puluh, bulan September, tahun dua ribu sembi pukul 14.15 WIB.

apan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usma
o Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Wahi
e Palguna, Saldi Isra, Suhartoyo, dan Manahan
sing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh M
nitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon, Pr
dan tanpa dihadiri oleh Dewan Perwakilan R

2. Dissenting Opinion

Prof. Dr. Yuliandri, S.H., M.H., “yang memiliki kekuatan hukum mengikat dan dapat dijadikan sebagai landasan hukum adalah pertimbangan/pendapat Hakim Konstitusi yang membangun amar putusan, sebab pertimbangan/pendapat tersebut dapat dianggap sebagai tafsiran dan interpretasi hakim terhadap suatu perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar tentang Undang-Undang Dasar 1945”.

Pendapat tersebut sejalan dengan pemikiran Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., M.H. yang memberikan pendapat bahwa “Pertimbangan hukum yang mengikat yang masuk kategori *'ratio decidendi'* atau rasio keputusan yang langsung berkaitan dengan kesimpulan dan amar, sedangkan selebihnya biasa disebut *'obiter dictatum'* tidak mengikat secara hukum”.

Rubrik Tanya Jawabnya tersebut, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH, MH, menjelaskan bahwa “Peraturan di bawah UU, bisa diuji ke Mahkamah Agung dengan menggunakan batu uji Undang-Undang dan putusan MK”. Dengan demikian, pertimbangan hukum yang telah diberikan dalam Putusan MK 50/2014 tetap mengikat dan dapat dipergunakan kembali untuk menjadi dasar dan pedoman dalam mengukur dan menentukan bahwa ketentuan Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu yang merupakan *copy paste* dari ketentuan Pasal 159 ayat (1) UU Pilpres bertentangan dengan Pasal 6A ayat (3) dan (4) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai tidak berlaku dalam hal hanya terdapat dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

A. Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang Berpotensi Terjadinya Pengulangan Pemilihan.

Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Maka dari itu Pemilu adalah salah satu cara untuk melaksanakan kedaulatan tersebut. Pemilu juga diatur dalam pasal 22E, namun untuk ketentuan syarat sah menjadi Presiden dan Wakil Presiden harus sesuai langkah langkah yang tertuang dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah tertuang pada pasal 6 sampai

54

7A. Perkara yang tertuang dalam permohonan yang mengakibatkan terjadinya pengulangan dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden mengacu pada Pasal 6A Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 6A UUD 1945 berbunyi:

- 1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. ***)
- 2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.***)
- 3) Pasangan calon Presiden dan wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara disetiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.***)
- 4) Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.****)
- 5) Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang.***)

Pasal 6A ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjadi salah satu aturan dalam pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang – Undang No 42 Tahun 2008 tentang Pemilhan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Undang – Undang No 42 Tahun 2008 sebagaimana pada bab XII berisi Penetapan Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Terpilih. Pasal 159, berbunyi

- Penjelasan dari pasal 159 Undang Undang Nomor 42 Tahun 2008 bahwa, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen (50%) dan mendapat sedikitnya 20% di 18 provinsi yang berada di Indonesia maka paslon tersebut dapat dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Mahfud MD.⁴³

43

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden adalah hal yang sangat penting untuk suatu negara. Pemimpin ada untuk menjaga kondisi dan stabilnya suatu negara. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden apabila terjadi pengulangan, pemilihan tersebut mengakibatkan tidak efisiennya waktu dan perpecahan. Pengulangan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden hanya bisa dilakukan apabila terdapat tiga pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Apabila hanya terdapat dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden syarat untuk terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden cukup mendapatkan suara lebih dari 50% (lima puluh persen suara), sehingga tidak diperlukan pengulangan kembali.

Pendapat para ulama terhadap pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden beberapa masih menyatakan belum tepat dan sesuai seperti zaman Rasulullah, karena Pemilu lebih mengutamakan untuk memilih pemimpin yang baik untuk negara. Pemilu juga menjadikan perbedaan pendapat antara haram atau halal dilaksanakan. Dua kelompok yang terbagi karena berbeda pendapat tentang Pemilu.

Pendapat ini dikemukakan Muḥammad ‘Abd Allāh al-Imām, Ḥâfîzh Anwâr, Mahmûd Syâkir, Muḥammad ibn Sa’ad al-Ghâmidî dan al-Amîn al-Ḥajj. Berbagai alasan bagi kelompok ini untuk melarang Pemilu sebagaimana yang dilakukan di Indonesia sekarang ini, seperti:

[illegible]

- أَمَّنْ هُوَ قَنِتْ ءَانَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدٌ ۖ وَقَائِمٌ ۖ يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ ۚ

Artinya : “Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui ? Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran” (Q.S. al-Zumar: 39)

- [illegible]

Dalil atau alasan yang memperbolehkan Pemilu seperti masa ini,

1. Sejarah Islam dan hisrtori Islam kenyataannya menunjukkan terdapat proses Pemilu.

3. Inti sesungguhnya baiat ialah pemberitahuan rakyat yang memberi baiat atas persetujuan terhadap calon yang akan dibaiat, hal ini seperti yang terjadi pada Pemilu saat ini.⁴⁶

4. Metode pengangkatan kepala negara atau *khalifah* termasuk kategori ijtihadiyah. Dalil khusus tidak ada yang membatasi antara satu

⁴⁶ Abd al-Ḥamid al-Anshārī, *al-Ālam al-Islāmī bayna al-Syūrâ wa al-Dimuqrathiyah*, (Cairo, Dâr al-Fikr al-Islâmî, 1922 H), Cetakan ke- 1, h.30 dan 324.

5. Kembali kepada umat sebagai pemilik hak dalam pemilihan seorang kepala negara atau hakim. Jika seperti itu, maka bagi mereka haknya terlibat langsung dalam pemilihan atau melalui wakilnya dari kalangan *ahl al-hall wa al-'aqd*.⁴⁸

Dengan demikian pemilihan umum bisa digunakan untuk memilih pemimpin selama pemilu tersebut tidak merugikan rakyat, tidak terjadi kerusakan atau bencana, dan sesuai dengan pilihan rakyat dalam memilih pemimpin tanpa ada paksaan dan pemimpin yang diajukan sesuai kriteria.

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia terdapat banyak sekali alasan alasan yang mengakibatkan haram atau halal dilaksanakan. Pemilu pada waktu dahulu belum dilaksanakan seperti sekarang ini, sehingga dirasa tidak sesuai dengan yang tertuang dalam Al-Quran atau hadis tertulis. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden digunakan untuk mempermudah, namun tetap berkeadilan dalam memilih pemimpin. Tentu bakal calon pemimpin di Indonesia yaitu calon Presiden dan Wakil Presiden dari orang orang yang sudah memenuhi syarat. Syaratnya untuk menjadi pemimpin juga sudah tertuang dalam Undang-Undang Dasar.

⁴⁸ Munîr al-Bayâtî, *al-Nizhâm al-Siyâsî al-Islâmî*, . 322 dan 325.

Pemilu berulang adalah tindakan yang sangat merugikan, yang padahal sudah benar benar sudah terpenuhi syaratnya yaitu lebih dari lima puluh persen suara. Pengulangan Pemilu banyak sekali kerugian yang bisa jadi menimbulkan haramnya dilaksanakan Pemilu, karena terjadi perpecahan tak kunjung menemukan solusi. Maka dari itu, Pemilu boleh dilakukan selama tidak merugikan dan tidak membuat negara menjadi pecah belah. Indonesia sebagai negara yang banyak sekali umat Islam, menyatakan bahwa cocok untuk menjadi negara *khalifah* sehingga Pemilu bukanlah tindakan yang pantas untuk negara seperti ini. Negara Indonesia ialah negara Kesatuan Republik Indonesia tidak bisa diubah dan menggunakan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan pedoman Pancasila. Sehingga Kedaulatan di tangan rakyat dan Pemilu adalah salah satu cara mewujudkan kedaulatan itu.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan pemaparan dari hasil penelitian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan penelitian itu sebagai berikut:

1. Mahkamah Konstitusi merupakan suatu lembaga kehakiman yang berwenang dalam menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar memiliki tugas dalam konsekuensi untuk menguji (judicial review) Undang-Undang Pemilihan Umum yang dinilai melenceng dan tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Perbedaan makna dalam Pasal 416 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 mengakibatkan pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Undang-Undang ini menjelaskan untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden terpilih dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden harus memenuhi persyaratan. Pengulangan terjadi apabila terdapat tiga pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. apabila hanya terdapat dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, maka tidak perlu dilakukan pengulangan. Cukup hanya syarat mendapatkan lebih dari lima puluh persen tambah satu ($50\% + 1$) suara dalam pemilihan tersebut.

2. Analisis tentang pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden secara *fiqh siyāsah* dusturiyah mengajarkan bahwa Pemilu bukanlah hal yang dilakukan pada saat masa Rasulullah. Pemilu memang tidak ada pada zaman tersebut hingga ada yang menyatakan haram. Namun pada masa Rasulullah dalam memilih pemimpin dengan metode musyawarah. Hal ini juga dilakukan dalam pemilihan umum yang mana masyarakat memilih dan menetapkan siapa yang menjadi Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

B. Saran

1. Sebaiknya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi memberikan penjelasan untuk tidak mengulang perkara yang sama. Karena mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang bersifat final dan tidak boleh ada permohonan yang sama untuk diajukan.
2. Terkait penjelasan dalam putusan MK hanya sebatas dijelaskan dalam lembaran negara. Hal ini kadang tidak terlalu diakses hingga menjadikan masyarakat merasa hak kewarganegaraannya tidak terlalu memahami perubahan atau pertimbangan hakim.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Anshârî, Abd al-Hâmid. *Al-‘Âlam al-Islâmî bayna al-Syûrâ wa al-Dimuqrathiyah*. Cairo : Dâr al-Fikr al-Islam, 1992.
- Al-Ghazali. *al-Iqtishad fi al-I’tiqad*. Mesir: Maktabah al-Jund, 1972.
- Al-Maududi, Abul A’la.. *Hukum dan Konstitusi Politik Islam*. Bandung: Mizan, 1993.
- Al-Mawardi, Imam. *Al-Ahkâm Sultāniyyah* (Sistem Pemerintahan Khilafah Islam), terj. Khalifurrahman dan Fathurrahman. Jakarta: Qisthi Press, 2015.
- Al- Mawardi, Imam. *Al-Ahkam al Suthaniyah wa al-Wilayatu al _Diniyah*. Terj. Abdul Hayyie al. TT.
- Al-Sirjani, Raghîb. TT. *Kaifâ Takhtaru Al-Ra’is Al Jumhuniyah*.
- Az-Zuhaili, Wahbah Wahbah al-Zuhaili. *Nizhamu Islam*. Jakarta : Gema Insani, 1984.
- Ammar, Abu. Jamaah. *Imamah Bai’ah Sebuah Kewajiban Syar’i Berdasarkan Al-Qur’an, As- Sunnah, Ijma, dan Qiyas*. Solo : Pustaka Arafah, 2010.
- Budiarjo, Miriam. *Dasar-Dasar ilmu Politik*, Edisi Revisi, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Dabbûs, Shalâh al-Dîn, *Al-Khalîfah Tawliyatuh wa ‘Azluh*. Iskandariyah: Muassasah al-Tsaqâfiyyah al-Jâmi’iyyah.
- Diantha, I MadePasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Fajar, Mukti, dkk. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

- Herlambang, Saifuddin. *Pemimpin dan Kepimpinan Dalam Al-Qur'an Sebuah Kajian Hermeneutik*. (Pontianak:Ayunindya), 2018.
- Huda, Khoiril, dkk. *Pemilu Presiden 2019: Antara Kontestasi Politik dan Persaingan Pemicu Perpecahan Bangsa*
- Ibrahim, Harmaily dan Kusnardi, Moh. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Ilmu Hukum, 2001.
- Iqbal, Muhammad. *Fīqh siyāsah dustūriyah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Iqbal, Muhammad dan Nasution, Amin Husein. *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Karim, M Rusli. *Pemilu Demokratis Kompetitif*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2010.
- Manzur, Ibnu. *Lisan Al-Arab*. Beirut : Al-Shadr, 1968.
- Mufti, Muḥammad Aḥmad. *Mafāhīm Siyāsah Syar'īyyah*. Amman: Dār al-Basyīr, 1418.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet.1.Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Nadzir, Mohammad. *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Nurdin , Kamaludin dan Kattani cet. 1. Jakarta: Gema Insani Press, . 2000.
- Pulungan, Suyuthi. *Fīqh siyāsah dustūriyah*. Yogyakarta: Ombak, 2014.
- Rojak, Jeje Abdul. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya, UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Samuddin, Rapung. *Fiqih Demokrasi, Menguak Kekeliruan Pandangan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik*. Jakarta: Gozian Press. Cet Pertama, 2013.

